



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



PASTI
BERGERAK



BERGERAK NEWS

BULETIN

MINGGU KE-3 FEBRUARI 2025



**KANWIL KEMENKUM
KALIMANTAN SELATAN**

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- PELAYANAN HUKUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[kumham_kalsel](#)



kalsel.kemenkum.go.id



HIGHLIGHT

BERGERAK NEWS



**12 KANWIL KEMENKUM
KALSEL GANDENG MUSISI
LOKAL GARAP ARANSEMEN
LAGU MARS KII**

**04 KEMENKUM KALSEL BAHAS
HARMONISASI RANCANGAN PERBUP
TABALONG, TATA RUANG PERKOTAAN
TANTA DISUSUN LEBIH
KOMPREHENSIF**

**05 RESMI DIKUKUHKAN, DWP
KEMENKUM KALSEL SIAP BERPERAN
AKTIF SERTA SUKSESKAN PROGRAM
KERJA**

**13 PERSIAPKAN RKT RB 2025,
KANWIL KEMENKUM KALSEL IKUTI
SOSIALISASI SECARA VIRTUAL**

**17 PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PATEN: KANWIL
KEMENKUM KALSEL
PERKUAT PEMAHAMAN
MELALUI SEMINAR NASIONAL**



**20 SEMANGAT
KEBERSAMAAN DI
PENGAYOMAN RUN
2025: PARTISIPASI
AKTIF KAKANWIL
KEMENKUM KALSEL
DAN JAJARAN USAI
PELATIHAN FUTURE
LEADERSHIP**



**14 KEMENKUM KALSEL
BENTUK TIM
FASILITASI
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
BERSAMA 60 SKPD
SE-KALSEL**

**19 MPN KANWIL KEMENKUM KALSEL
HADIRI SIDANG PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN**

**21 BUKAN SEKADAR KEMENANGAN,
PENGAYOMAN RUN 2025 BANGUN
KEBERSAMAAN UNTUK HIDUP
SEHAT**

kemenkumkalsel
 kumham_kalsel
 kalsel.kemenkum.go.id



Apel Pagi Kemenkum Kalsel, Tekankan Optimalisasi Pola Kerja dan Disiplin Pegawai



Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Apel Pagi, Senin (17/02). Bertindak sebagai Pembina Apel Pagi, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari dan sebagai Pemimpin Apel Pagi, JFT Analis Anggaran Ahli Muda, Ahmad Zubaidi. Hadir dalam Apel Pagi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah; Pejabat Manajerial, Pejabat Non Manajerial, PPNPN dan Siswa/siswi magang.

Dalam amanat yang disampaikan, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, menekankan pentingnya penyesuaian dan optimalisasi pola kerja dalam rangka mencapai program dan target kinerja yang telah ditetapkan. “Penyesuaian dan optimalisasi pola kerja sangat penting untuk mencapai program dan target kinerja yang telah ditetapkan, ujar Dewi Woro.

Dewi Woro Lestari juga menggarisbawahi bahwa disiplin kerja harus tetap diutamakan sebagai langkah strategis untuk mendukung efisiensi anggaran. “Dengan menjaga disiplin dalam pola kerja, kita dapat memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Bidang AHU sampaikan agenda kegiatan pada Kanwil Kemenkum Kalsel dimana pada hari ini akan dilaksanakan Gladi Bersih persiapan pengukuhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah yang akan dilaksanakan pada Selasa 18 Februari 2025. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Kemenkum Kalsel Gelar Webinar OKE KI: Strategi Kelola Hak Ekonomi Karya Cipta di Era Digital



Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) berpartisipasi aktif dalam Webinar OKE KI (Obrolan Kreatif & Edukatif Kekayaan Intelektual) dengan tema “Cara Mengelola Hak Ekonomi atas Karya Cipta Yang Dihasilkan Dalam Dunia Digital”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, termasuk Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melalui media virtual pada Senin (17/02).

Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan hak ekonomi atas karya cipta di era digital, di mana tantangan dan peluang baru terus bermunculan. Para peserta mendapatkan wawasan mengenai strategi perlindungan dan pemanfaatan hak cipta dalam konteks digital, yang semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dalam diskusi, ditekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam mengelola hak ekonomi agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari karya cipta. Selain itu, dibahas juga mengenai regulasi dan kebijakan terbaru yang mendukung perlindungan hak cipta di dunia digital.

Acara ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pelaku industri kreatif di Kalimantan Selatan dalam mengelola hak ekonomi mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Iwan, Eko)





Pastikan Pengukuhan DWP Berjalan Lancar, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Gladi Bersih Secara Virtual



Banjarmasin, Humas_Info - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti gladi bersih pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia masa bakti 2025-2029 periode 2025 pada Senin (17/02) di Ruang Rapat Kakanwil secara Virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis sebelum acara pengukuhan besok hari.

Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel yang akan dilantik, Ny. Desty Anton Edward Wardana, turut hadir dalam gladi bersih ini, didampingi oleh Wakil Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel, Ny. Puspita Meidy Firmansyah, serta jajaran pengurus lainnya. Dalam kegiatan ini, bertujuan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jaringan internet, audio-visual, tata letak meja dan kursi, serta pencahayaan guna memastikan kelancaran prosesi pengukuhan secara online yang diikuti Kanwil Kemenkum Kalsel.



Pengukuhan secara virtual ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DWP Kemenkum dalam memperkuat organisasi serta meningkatkan sinergi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya gladi bersih ini, diharapkan seluruh persiapan teknis telah optimal sehingga acara pengukuhan dapat berlangsung dengan baik dan tanpa kendala.

Acara pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia dijadwalkan akan digelar pada Selasa (18/02) dengan diikuti oleh seluruh perwakilan DWP Kanwil Kemenkum dari berbagai daerah secara daring dan luring dari Graha Pengayoman di Jakarta. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)

Kemenkum Kalsel Bahas Harmonisasi Rancangan Perbup Tabalong, Tata Ruang Perkotaan Tanta Disusun Lebih Komprehensif

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali menggelar Rapat Harmonisasi peraturan daerah, kali ini membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta. Rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkum Kalsel, Rabu (18/02/2025) ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi serta memastikan peraturan yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.

Harmonisasi dibuka oleh Bahjatul Mardiah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, yang menegaskan pentingnya forum ini dalam memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, Wibawa Agung S.; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Norma Zhahriati, serta jajaran dari dinas terkait.

Dalam sambutannya, Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar penyelarasan hukum, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan tata ruang yang lebih tertata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong.

Dalam sesi diskusi, tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan berbagai tanggapan dan masukan teknis terhadap rancangan peraturan. Salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya keterlibatan lintas sektoral dalam penyusunan tata ruang, agar regulasi yang ditetapkan nantinya benar-benar holistik dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan daerah. Selain itu, tinjauan konsepsi pasal per pasal juga menjadi fokus utama, terutama dalam aspek tata penulisan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada benturan dengan peraturan yang lebih tinggi terkait tata ruang.

Rancangan peraturan ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan kawasan perkotaan di Kecamatan Tanta, terutama dalam menghadapi pertumbuhan wilayah dan kebutuhan infrastruktur di waktu mendatang. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta dapat segera difinalisasi dan disahkan menjadi regulasi yang mendukung pertumbuhan wilayah secara terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Humas Kemenkum Kalsel, ed : Eko, Mahdian)



Resmi Dikukuhkan, DWP Kemenkum Kalsel Siap Berperan Aktif Serta Sukseskan Program Kerja



Banjarmasin, Humas_Info - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan secara bersama-sama dalam kegiatan Pengukuhan Ketua & Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Seluruh Indonesia Masa Bakti 2024 - 2029 Periode 2025. Adapun Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel yang dilantik yaitu Ny. Desty Anton Edward Wardhana, didampingi oleh Wakil Ketua, Ny. Puspita Meidy Firmansyah, serta seluruh pengurus DWP Kanwil Kemenkum Kalsel pada Selasa (18/02).

Kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua DWP Kemenkum masa bakti 2024-2029 periode 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Ketua DWP dan Pengurus Kanwil Kemenkum dari seluruh Indonesia. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Penasihat DWP Pusat, Ny. Mega Edward Omar, serta Ketua DWP Kemenkum RI, Ny. Ully Nico Afinta.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kemenkum RI, Ny. Ully Nico Afinta, menegaskan bahwa terbentuknya DWP Kemenkum RI merupakan tindak lanjut dari keputusan presiden terkait pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat kementerian baru.

"DWP bukan hanya pendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga berperan dalam pemberdayaan perempuan serta pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui peran aktif para anggotanya," sebut Ully Nico Afinta.

Sementara itu, Penasihat DWP Kemenkum RI, Ny. Mega Edward Omar, dalam arahannya mengingatkan seluruh anggota DWP untuk memahami visi dan misi organisasi serta melaksanakan program kerja di masing-masing wilayah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran dalam keluarga dan kontribusi terhadap institusi.

Sebagai organisasi yang menaungi istri ASN dan pegawai wanita di lingkungan Kemenkum RI, DWP saat ini beranggotakan sekitar 5.700 orang. Diharapkan seluruh anggota dapat berperan aktif, inovatif, dan berdaya guna baik bagi keluarga maupun masyarakat luas, sejalan dengan visi dan misi DWP dalam mendukung pembangunan nasional. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Audiensi Strategis Layanan KI dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI di Dekranasda Banjarbaru



Banjarbaru, KI_Info - Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) mengadakan audiensi bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarbaru. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait kekayaan intelektual (KI), kebijakan, serta program-program yang akan diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan. Pertemuan ini dihadiri oleh Lina Mardiaty, Perwakilan Dekranasda Kota Banjarbaru, Meidy Firmasnyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tim layanan KI, sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan Layanan KI dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Dalam Pertemuan tersebut, Kadiv Meidy selaku perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menjelaskan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah mengenai CPU (Catur Program Unggulan), tahun tematik, serta kebijakan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa mulai tahun 2025, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk hak cipta akan dinaikkan menjadi Rp. 200.000. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor kekayaan intelektual terhadap pendapatan negara.

Selain itu, Meidy juga memaparkan program Jelajah KI, yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis kekayaan intelektual. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Ia juga menjelaskan tentang akselerasi penyelesaian KI, Mobile IP Clinic. Juga disarankan agar merek kolektif "MESS L" dapat dibentuk untuk mendukung UMKM binaan Dekranasda. Merek kolektif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun nasional.

Mas Aji Tim Layanan KI juga menjelaskan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI pada tahun 2026. Program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih teratur dan berbasis kekayaan intelektual

Sementara itu, Kabid Pelayanan KI, Riswandi menekankan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa produk yang telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak terdaftar.

Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kolaborasi antara Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Selatan dan Dekranasda Kota Banjarbaru dalam upaya pengembangan kekayaan intelektual. Diharapkan, langkah-langkah strategis yang telah dibahas dapat segera diimplementasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Iwan, Eko)





Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Balangan, Harmonisasikan Tiga Raperda Sekaligus



Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Balangan dalam rangka harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Balangan, Selasa (18/02). Adapun ketiga Raperda yang akan diharmonisasikan adalah Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting,

Raperda tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan, dan Raperda tentang Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti WidSyastuti, menyambut baik kunjungan ini dan memperkenalkan jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (PPPH), khususnya tim Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Kalsel yang akan terlibat dalam proses harmonisasi.

Dalam sambutannya, Nuryanti menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemeku “Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk melaksanakan harmon

asi Ranperda dan Raperkada sesuai dengan perintah Undang-undang sehingga peraturan daerah selaras dengan peraturan di atasnya dan memberikan dampak baik bagi masyarakat luas,” ujar Nuryanti.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Rizkan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia menyatakan bahwa harmonisasi tiga Raperda ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan peraturan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Dipaparkan tanggapan oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bergantian. Diharapkan Harmonisasi ini mampu memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pengaturan sertifikat kepemilikan bangunan, serta penanggulangan kebakaran di Kabupaten Balangan.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana; Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Syamsudin Noor; Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Hasan Nor Arifin; Bapemperda DPRD Kabupaten Balangan; BPBD Kabupaten Balangan; JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel; dan JFT Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko)





Dukung Peningkatan Akses Keadilan, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti secara virtual di Balai Pertemuan BerAkhlak pada Selasa (18/2) ini menandai dimulainya pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Februari 2025.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan yang merata di Indonesia.

Kepala BPHN, Min Usihen, yang menjadi keynote speaker, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berlangsung selama tiga hari dalam kelas (on class), tetapi juga akan dilanjutkan dengan aktualisasi kemampuan peserta di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan (off class).

Lebih lanjut, Min Usihen menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak agar Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya sekadar menjadi proyek seremonial.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 3.029 peserta di seluruh Indonesia, dengan 47 peserta berasal dari Kalimantan Selatan yang mewakili dua kota dan lima kabupaten. Selama tiga hari pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi mengenai Pengetahuan Dasar, Pengetahuan Teknis, serta aktualisasi praktik di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan ke depan. Dengan pelatihan ini, diharapkan setiap desa dan kelurahan dapat menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik pelaksanaan Kick Off Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Menurutnya, kehadiran paralegal yang terlatih akan memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan dalam memberikan layanan hukum bagi warga yang membutuhkan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana juga menyampaikan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan fungsi Posbankum Desa/Kelurahan.

"Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi pemberi bantuan hukum, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan serta efektivitas layanan yang diberikan oleh Posbankum," ungkapnya. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

KICK OFF PELATIHAN PARALEGAL SERENTAK KHUSUS KELOMPOK KADARKUM
SEBAGAI PEMBERI LAYANAN POSBANKUM DESA/KELURAHAN
ANGKATAN I TAHUN 2025



Rapat Paripurna DPRD Kalsel Bahas Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah, Kemenkum Kalsel Turut Hadir



Banjarmasin, Humas_Info - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (19/02) atas Rancangan Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti.

Rapat Paripurna dibuka oleh Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim. Dalam pembukaannya, ia menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan produk hukum daerah. Salah satu poin utama yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setelah pemaparan awal, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap dua Raperda, tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dan tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi. Gubernur Kalimantan Selatan, melalui Plh. Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, M.Pd, menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terkait kedua Raperda tersebut.

Selain itu,

dalam rapat ini, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penjelasan terkait urgensi pembentukan tiga Raperda lainnya, tentang Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalimantan Selatan, tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan hasil keputusan bersama yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo, S.M., dan Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M.

Dengan adanya pembahasan dan keputusan dalam Rapat Paripurna ini, diharapkan peraturan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (Kontributor Div PPPH/Rezki, Ed : Iwan/Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab HST Harmonisasikan 2 Raperbup, Wujudkan Regulasi untuk Kesejahteraan Masyarakat



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (19/02) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 188.342/102/KUM/2025 tanggal 22 Januari 2025 dan Nomor 188.342/114/KUM/2025 tanggal 24 Januari 2025 mengenai harmonisasi Raperbup setempat.

Rapat harmonisasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana. Dalam pembahasannya, rapat menyoroti dua pokok utama, yakni perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta implementasi zona pendidikan anti korupsi di sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa proses harmonisasi rancangan peraturan bupati dilakukan secara transparan guna memastikan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap regulasi yang diajukan.

“Kami menjamin setiap tahapan harmonisasi berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalsel juga secara aktif melakukan publikasi setiap proses harmonisasi yang dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hamsinah, turut menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang melandasi pengajuan Raperbup tersebut.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam setiap pasal dalam rancangan peraturan oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Analis Hukum guna memastikan keselarasan serta kepastian hukum dari regulasi yang akan diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HST, Taufik Rahman; jajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).

Pelatihan Paralegal Serentak Kadarkum Hari Kedua : Penguatan Kapasitas melalui Pembekalan Materi



Banjarmasin, Humas_Info – Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan memasuki hari kedua pada Rabu (19/02). Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Februari 2025 dan diikuti oleh 47 peserta dari Kalimantan Selatan.

Pada hari kedua pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan materi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK). Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting dalam peran paralegal, yaitu: Struktur Masyarakat, yang membahas dinamika sosial dan pola hubungan dalam masyarakat; Advokasi dan Bantuan Hukum, yang menyoroti peran paralegal dalam mendampingi masyarakat dalam masalah hukum; Minoritas dan Kelompok Rentan, yang mengupas hak-hak serta perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi; serta Teknik Komunikasi Paralegal, yang memberikan keterampilan komunikasi efektif dalam memberikan layanan hukum.

Pelatihan ini tidak hanya berlangsung selama tiga hari dalam kelas (on class), tetapi juga akan dilanjutkan dengan aktualisasi kemampuan peserta melalui praktik langsung di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan (off class). Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan menjalankan aktualisasi akan memperoleh sertifikat non-akademik Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peserta mampu berperan aktif dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, guna meningkatkan kesadaran hukum serta akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Gandeng Musisi Lokal Garap Aransemen Lagu Mars KII



Banjarmasin, KI_Info- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar koordinasi intensif bersama sejumlah pihak untuk menyukseskan sayembara aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia (KII), yang digagas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis (13/02) ini dihadiri oleh Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tim layanan KI, sebagai bentuk sinergi dalam menyatukan visi pelestarian budaya dan penguatan hak kekayaan intelektual.

Dalam rapat tersebut, Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memadukan unsur tradisi Nusantara, khususnya instrumen khas Kalimantan Selatan seperti panting, ke dalam aransemen Mars KII. Proses kreatif ini melibatkan musisi dan ahli budaya lokal, dengan durasi pengerjaan diperkirakan mencapai dua minggu. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan karya musik yang merepresentasikan identitas budaya lokal, tetapi juga memperkuat jejaring kerja antara instansi pemerintah, praktisi seni, dan komunitas budaya. Sinergi tersebut diharapkan menjadi model integrasi kearifan lokal dalam kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya.



Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini merupakan strategi jangka panjang untuk mendorong inovasi di bidang KI, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif bagi pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, Mars KII tidak hanya menjadi simbol semangat nasionalisme, tetapi juga bukti nyata harmonisasi antara hukum, seni, dan budaya dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan. (Humas Krmekum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Joel, Eko)



Persiapkan RKT RB 2025, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Secara Virtual

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual, Senin (17/2).

Dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, turut serta bersama jajaran untuk memahami mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi RB di tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dalam menerapkan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Para narasumber memberikan pemaparan mengenai alur dan timeline pelaksanaan RKT RB 2025, yang akan diterapkan oleh seluruh Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkum.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan setiap unit kerja dapat memahami langkah-langkah strategis dalam implementasi Reformasi Birokrasi 2025. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi ini secara optimal guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Kemenkum Kalsel Bentuk Tim Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bersama 60 SKPD se-Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar rapat koordinasi pembentukan Tim Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual (KI) bersama 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalimantan Selatan, Rabu (19/2/2025). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini bertujuan untuk memperkuat layanan kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan inovasi serta kreativitas di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan bahwa fasilitasi layanan KI sangat penting untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

Dalam rapat tersebut, Kemenkum Kalsel juga memaparkan empat program unggulan layanan KI tahun 2025 yang menjadi fokus utama, yaitu:

- (1) Jelajah KI – Program eksplorasi dan identifikasi potensi KI di seluruh wilayah Kalsel;
- (2) Kawasan Wisata Berbasis KI – Mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan sektor pariwisata;
- (3) Akselerasi Penyelesaian KI – Upaya percepatan proses pendaftaran dan pencatatan KI agar lebih efisien; dan
- (4) Mobile IP Clinic – Layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan KI tanpa harus datang ke kantor wilayah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menambahkan bahwa program-program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas kreatif.

Dalam rapat ini, Tim Fasilitasi KI juga diberikan tugas strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis peningkatan permohonan pendaftaran dan pencatatan KI, diantaranya : (1) Melakukan sosialisasi edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat tentang terkait pendaftaran serta perlindungan KI.

Selain itu, beberapa rencana kerja yang perlu ditindaklanjuti mencakup pendataan perguruan tinggi di kabupaten/kota yang belum terjangkau layanan KI, peningkatan pengetahuan KI bagi pemerintah daerah, serta koreksi implementasi kebijakan agar lebih efektif.

Diharapkan, koordinasi yang telah dilakukan ini dapat mempercepat pertumbuhan KI di Kalimantan Selatan, serta mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi bagi masyarakat dan daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko, Mahdian)



Kanwil Kemenkum Kalsel dan LKBHuWK Bersinergi Gelar Pelatihan Paralegal Serentak di Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum dan akses keadilan di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan dan diikuti oleh 47 peserta dari tujuh daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Pelatihan ini diawali dengan pre-test yang dipandu oleh Analis Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum, Yulli Rachmadani, bersama Ketua LKBHuWK Kalsel, Yulia Qamaryanti. Kegiatan ini menandai dimulainya pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari dengan total durasi 18 jam pelajaran. Setelah menyelesaikan sesi kelas, peserta juga akan menjalani masa aktualisasi di lapangan selama tiga bulan di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan masing-masing.

Pada hari pertama pelatihan, peserta mendapatkan tiga materi utama dari para narasumber berpengalaman. Materi pertama, Pengantar Hukum dan Demokrasi, disampaikan oleh Sekretaris LKBHuWK Kalsel, Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H. Sesi kedua membahas Hak Asasi Manusia, yang dibawakan oleh Dianor, S.H., M.H., selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda. Sementara itu, materi ketiga mengenai Keparalegalan disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Togi Leonardo Situmorang, S.H.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensinya sebagai paralegal dan berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong terbentuknya Posbankum Desa/Kelurahan yang efektif, sehingga setiap warga dapat memperoleh akses hukum yang lebih luas dan merata.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Pelatihan ini bukan hanya tentang meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga membekali para peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum di Posbankum Desa/Kelurahan," ujarnya.

Anton menambahkan bahwa sinergi antara Kanwil Kemenkum, organisasi pemberi bantuan hukum, dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi Posbankum sebagai wadah pelayanan hukum yang efektif. (Humas Kanwil Kemenkum, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Pelatihan Paralegal Serentak Kadarkum Hari Ketiga: Simulasi dan Evaluasi Kompetensi



Banjarmasin, Humas_Info – Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) resmi memasuki hari ketiga, Kamis (20/02). Pada hari terakhir pelatihan ini, peserta difokuskan pada simulasi praktik layanan bantuan hukum serta evaluasi kompetensi guna memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas sebagai paralegal di wilayah masing-masing.

Pada hari ketiga ini, peserta mendapatkan berbagai materi penting yang menunjang peran mereka sebagai paralegal. Materi pertama mengenai Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia membahas tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku di peradilan Indonesia. Selanjutnya, peserta diberikan pembekalan Teknik Penyusunan Dokumen, Pelaporan, dan Kronologis, yang memberikan keterampilan dalam menyusun dokumen hukum secara sistematis dan akurat. Salah satu sesi penting dalam pelatihan ini adalah Simulasi Penanganan Kasus, di mana peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mempraktikkan berbagai skenario pendampingan hukum.

Selain itu, evaluasi kompetensi dilakukan melalui post-test yang dipandu oleh tim Kanwil Kemenkum Kalsel dan LKBHuWK. Evaluasi ini mencakup aspek pemahaman materi, keterampilan komunikasi hukum, serta kesiapan peserta dalam memberikan layanan bantuan hukum berbasis komunitas.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, secara terpisah menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan selama tiga hari penuh.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan menjalani masa aktualisasi di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan masing-masing selama tiga bulan. Mereka yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan, termasuk aktualisasi, akan memperoleh sertifikat non-akademik Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Dengan berakhirnya sesi pelatihan kelas ini, Kanwil Kemenkum Kalsel dan LKBHuWK berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas paralegal di daerah.

Pelatihan ini kemudian ditutup secara resmi oleh perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel dan LKBHuWK, menandai selesainya rangkaian kegiatan pelatihan paralegal serentak yang telah berlangsung selama tiga hari. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Perubahan Undang-Undang Paten: Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Pemahaman melalui Seminar Nasional

Banjarmasin, KI_Info – Dalam upaya memperkuat perlindungan paten dan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Seminar Nasional yang membahas perubahan signifikan dalam Undang-Undang Paten, Kamis (20/02). Jajaran Kanwil kemenkum Kalsel turut mengikuti daring dari Kantor Wilayah acara yang dihadiri oleh para akademisi, praktisi hukum, serta pemegang hak kekayaan intelektual ini

Acara ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi baru. Seminar yang berlangsung di Jakarta ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antaranya Dr. Insan Budi Maulana, seorang IP User berpengalaman, Prof. Dr. Cita Citrawinda, Konsultan HKI ternama, serta Ibu Yamamoto, Konsultan HKI dari Jepang.

Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam kegiatan ini, termasuk Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, bersama timnya. Tim berupaya memperdalam pemahaman terkait aturan baru guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan hak paten di daerah, khususnya Kalimantan Selatan.

Perubahan Signifikan dalam Undang-Undang Paten

Dalam seminar ini, sejumlah pokok perubahan dalam undang-undang paten menjadi perhatian utama. Regulasi terbaru menyoroti aspek-aspek penting, seperti definisi invensi yang tidak dapat dipatenkan, hak serta kewajiban pemegang paten, hingga prosedur banding terhadap penolakan permohonan paten.

“Perubahan dalam undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran paten dan memberikan kepastian hukum bagi para inovator,” ujar Dr. Insan Budi Maulana dalam paparannya. Ia juga menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi aturan baru agar lebih efisien dan transparan.

Perubahan Biaya Permohonan Paten dan Dampaknya

Salah satu isu yang menarik perhatian peserta adalah revisi biaya permohonan paten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45/2024. Perubahan ini mencakup biaya tambahan untuk kelebihan klaim dan deskripsi, biaya pemeriksaan substantif, serta biaya percepatan pemeriksaan. Perubahan biaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pemohon serta menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi paten yang semakin kompleks.

Perspektif Pemohon Paten Internasional

Dari sudut pandang pemohon internasional, beberapa tantangan masih perlu diatasi dalam implementasi undang-undang baru ini. Beberapa keluhan yang muncul antara lain keterlambatan dalam sistem pengiriman surat pemeriksa melalui aplikasi SAKI, serta permohonan yang belum diproses meskipun telah diajukan lebih dari lima tahun lalu.



Kanwil Kemenkumham Kalsel Dorong Peningkatan Kesadaran Kekayaan Intelektual Melalui Pameran dan Promosi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Target Kinerja bersama Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi yang diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kamis (20/2).

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa kantor wilayah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menyebarluaskan informasi mengenai hak kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat.

Dalam rakor tersebut, dibahas mengenai partisipasi Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam kegiatan pameran dan promosi kekayaan intelektual. Kanwil berencana membuka booth layanan Kekayaan Intelektual dalam berbagai pameran untuk memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kekayaan intelektual. Selain itu, layanan seperti asistensi, konsultasi, dan penelusuran kekayaan intelektual juga akan diberikan kepada pengunjung dan peserta pameran.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” tambahnya.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dinilai mampu memperkuat posisi ekonomi pelaku usaha. Dengan adanya pameran ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat pendaftaran KI, baik dalam bentuk hak paten, merek dagang, maupun hak cipta.

Kanwil Kemenkum Kalsel juga didorong untuk berperan aktif dalam berbagai pameran yang diselenggarakan oleh mitra di wilayah. Partisipasi dalam acara-acara ini dinilai mampu menarik lebih banyak minat dari pengunjung dan meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual secara signifikan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, secara terpisah menyatakan dukungannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan akan berupaya melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan langkah ini, Kanwil Kemenkum Kalsel optimis dapat memperkuat ekosistem perlindungan hak kekayaan intelektual serta mendorong inovasi dan kreativitas di wilayah Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko, Iwan).



MPN Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin



Banjarmasin, AHU_Info - Dalam rangka memenuhi Reelas Panggilan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tim Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menghadiri persidangan perkara perdata pada Kamis (20/2). Kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Ryna Frensiska, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pengawas Notaris.

Kehadiran Tim MPN Kanwil Kemenkum Kalsel di persidangan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme dan integritas lembaga, serta memberikan kontribusi terhadap transparansi sistem peradilan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan informasi serta keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan guna memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami senantiasa mendukung kelancaran proses persidangan serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui partisipasi dalam persidangan ini, diharapkan Majelis Pengawas Notaris Kanwil Kemenkum Kalsel dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penegakan hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan di Kalimantan Selatan. Selain itu, pengawasan terhadap notaris menjadi aspek penting dalam menjaga legalitas serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan profesi notaris

Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris Kanwil Kemenkum Kalsel terus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa praktik kenotariatan di wilayah Kalimantan Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung sistem peradilan yang adil dan transparan. (Humas Kanwil Kalsel, Teks dan foto: Kontributor Bidang AHU, ed : Eko/Mahdi)



Semangat Kebersamaan di Pengayoman Run 2025: Partisipasi Aktif Kakanwil Kemenkum Kalsel dan Jajaran Usai Pelatihan Future Leadership



Jakarta, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, turut berpartisipasi dalam ajang lari tahunan "Pengayoman Run 2025" yang diselenggarakan di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/02) pagi. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta dengan dua kategori lomba, yakni lari jarak 5 km dan 10 km.

Sebelumnya, ketiga pejabat tersebut telah mengikuti Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum di Depok. Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, dari 19 hingga 22 Februari 2025, bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan yang profesional, berintegritas, dan memiliki semangat bela negara.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyatakan bahwa partisipasi dalam "Pengayoman Run 2025" merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai kebangsaan dan semangat kebersamaan yang diperoleh selama pelatihan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang juga turut serta dalam lomba lari 5 km, menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui partisipasi peserta dan dukungan sponsor.

"Pengayoman Run 2025" diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang mempromosikan gaya hidup sehat serta memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh pegawai Kementerian Hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum kepada masyarakat luas pasca restrukturisasi yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi aktif dari jajaran Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen dalam mengimplementasikan hasil pelatihan kepemimpinan serta berkontribusi positif bagi kesehatan dan kebersamaan di lingkungan kerja. (Humas Kemenkum Kalsel, ed : Eko, Joel)





Bukan Sekadar Kemenangan, Pengayoman Run 2025 Bangun Kebersamaan untuk Hidup Sehat



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyelenggarakan Pengayoman Run 2025, ajang lari 5km dan 10km, Minggu (23/02/2025).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ajang lari ini bukan bertujuan memenangkan hadiah semata. Namun, Kemenkum ingin membangun semangat kebersamaan masyarakat Indonesia untuk menjaga pola hidup sehat.

"Yang ingin kami tekankan adalah Pengayoman Run bukan tentang kemenangan saja. Tetapi membangun semangat kebersamaan kita. Membangun hidup yang lebih sehat," ujar Supratman usai menyelesaikan lari 5km yang ia ikuti.

Ia menyebutkan lari adalah olahraga paling murah, bisa dilakukan kapan pun dan di mana saja. Sehingga mimpi membangun Indonesia yang lebih sehat tidaklah mustahil.

"Ini (lari) olahraga paling murah kan. Karena itu kita mengajak semua masyarakat lebih sadar tentang kesehatan," katanya di GOR Soemantri.

Selain kesehatan fisik, lanjut Supratman, ajang lari sekaligus mengajarkan peserta tentang kekonsistenan, daya juang, dan pantang menyerah dalam mencapai garis finish.

"Dalam setiap langkah lari kita, ada semangat pantang menyerah. Semangat ini harus kita bawa dalam upaya memajukan bangsa Indonesia, melalui bidang tugas kita masing-masing," lanjut Supratman dalam kegiatan bertajuk 'Bersama Kita Lindungi Karya Anak Bangsa' tersebut.

Menteri kelahiran Sulawesi ini berharap Pengayoman Run 2025 dapat menjadi kegiatan tahunan. Ia menyebut ajang lari yang diikuti sekitar 5000 peserta ini sama sekali tidak menggunakan APBN. Semua biaya merupakan dukungan dari mitra Kemenkum dan peserta sendiri.

"Kami tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Semuanya urunan peserta, juga dukungan sponsor dan mitra kerja Kemenkum," tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, yang turut serta dalam ajang lari ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif Pengayoman Run 2025. Menurutnya, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi kesehatan sekaligus mempererat solidaritas di antara pegawai Kemenkum dan masyarakat luas.

"Saya sangat mengapresiasi Pengayoman Run 2025. Ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga kesempatan bagi kita semua untuk menumbuhkan kebersamaan, semangat juang, dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Saya berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang ikut serta di tahun-tahun mendatang," ujar Nuryanti Widyastuti.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



**PASTI
BERGERAK**



Terhubung lebih



[kemenkumhamkaxsel](#)

[kumham](#)

[kalsel.kemenkumha](#)

.g